



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PRONOJIWO**

JL. RAYA PRONOJIWO NO. 112 PRONOJIWO TLP. (0334) 590045
E-MAIL: KEC_PRONOJIWO@LUMAJANGKAB.GO.ID
PRONOJIWO - 67374

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pronojiwo dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul : “ **PERUBAHANRENCANA KERJA (P-RENJA) KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020** “.

Perubahan Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan serta sasaran dan target Rencana Kerja Kecamatan Pronojiwo, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan Perubahan Rencana Kerja yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini, tak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini semua kebijakan Program dan Kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik Aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun masyarakat serta DPRD, agar dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Perubahan Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Pronojiwo maupun pihak lain yang memerlukannya.

Lumajang, Juni 2020
CAMAT PRONOJIWO


Drs. ABDULLAH
NIP. 19650814 198803 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum.....	3
3. Maksud Dan Tujuan.....	5
4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II	6
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	25
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang membuat Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Instansi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Pronojiwo menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai

salah satu acuan bagi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

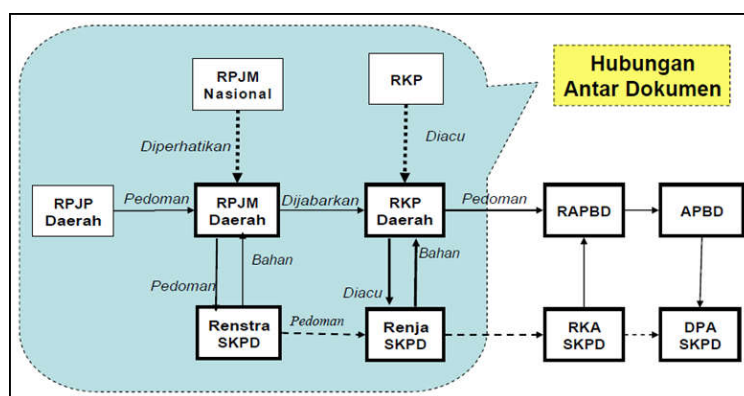
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum. Kecamatan Pronojiwo untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (SEMESTER I) TAHUN BERKENAAN;

Berisi tentang review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 berdasarkan form E-60;

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang : uraian penutup.

Lampiran

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II

Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pronojiwo sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

1. Realisasi Program dari 4 Program belum ada yang mencapai 100%, antara lain :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sampai dengan triwulan II sudah mencapai 52,33% dari rencana anggaran Rp. 372.901.700,00
 - b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sampai dengan triwulan II sudah mencapai 68,51% dari rencana anggaran Rp. 97.425.000,00
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 31,41% dari rencana anggaran Rp. 4.513.000,00
 - d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 47,86% dari rencana anggaran Rp. 277.245.000,00
2. Realisasi kegiatan dari 11 kegiatan ada sebagian yang sudah mencapai 100%, yang dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran sampai dengan triwulan II sudah mencapai 52,33% dari rencana anggaran Rp. 372.901.700,00
 - b. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur sampai dengan triwulan II sudah mencapai 100% dari rencana anggaran Rp. 44.200.000,00
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur sampai dengan triwulan II sudah mencapai 42,37% dari rencana anggaran Rp. 53.225.000,00
 - d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP sampai dengan triwulan II sudah mencapai 100% dari rencana anggaran Rp. 1.418.000,00

- e. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 1.043.000,00
 - f. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sampai dengan triwulan II sudah mencapai 0% dari rencana anggaran Rp. 2.052.000,00
 - g. Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 50% dari rencana anggaran Rp. 151.200.000,00
 - h. Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat sampai dengan triwulan II sudah mencapai 41,67% dari rencana anggaran Rp. 7.200.000,00
 - i. Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan triwulan II sudah mencapai 43,01% dari rencana anggaran Rp. 48.870.000,00
 - j. Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunansampai dengan triwulan II sudah mencapai 100% dari rencana anggaran Rp. 3.350.000,00
 - k. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat dengan triwulan II sudah mencapai 100% dari rencana anggaran Rp. 66.625.000,00
3. Jika dilihat dari tingkat penyerapannya anggaran dari 4 Program triwulan II mencapai 52,33% dari total anggaran Belanja Langsung Rp. 752.084.700,00 dan dan untuk penyerapannya anggaran Belanja Tidak Langsung triwulan II mencapai 44,01% dari total anggaran Rp. 1.359.146.583,00, dengan total Anggaran Rp. 2.144.080.030,00 dan capaian realisasi sebesar 47,09%.

Adapun evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II untuk lebih jelasnya terjabarkan pada Form E-60 sebagai berikut:

Tabel Form E-60

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Kecamatan Pronojiwo s/d semester I tahun 2020

NO	SASARAN	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja pada triwulan (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD 2020		Realisasi Kinerja dan anggaran RPJMD (akhir Tahun pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		PERANGKAT DAERAH (Penanggung jawab)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	13 (8+9+10+11)		14=7+13			15=14/6x100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 (8+9+10+11)		14=7+13		15=14/6x100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3051	KECAMATAN PRONOJIWO							2.144.018.030		443.150.037		550.974.067											KEC. PRONOJIWO	
		30590	BELANJA TIDAK LANGSUNG							1.391.933.330		290.455.977		307.677.727												
		3059000	Belanja Tidak Langsung							752.084.700		152.694.060		243.296.340												
		30591	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100%	732.769.205	100%	399.990.583	100%	380.151.700	92%	85.804.060	100%	109.333.340					100%	195.137.400						
		30591021	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	26 jenis	732.769.205	26 Jenis	399.990.583	23 jenis	380.151.700	24 jenis	85.804.060	2 jenis	109.333.340					26 Jenis	195.137.400						

			3	0	1	0		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	415.620 .871	100%	99.313.5 00	100%	97.425. 000	50%	8.200.00 0		58.550.0 00							100%	66.750.000
			3	0	1	0	0	Pembangunan/Pengada an dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	10 jenis	299.750 .000	7 Jenis	38.500.00 0	5 Jenis	44.200. 000	0 Jenis	0,00	5 Jenis	44.200.00 0						5 Jenis	44.200.000	
			3	0	1	0	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	15 jenis	115.870 .871	5 Jenis	60.813.50 0	7 Jenis	53.225. 000	6 jenis	8.200.000	1 Jenis	14.350.00 0						7 Jenis	22.550.000	
			3	0	1	0		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	19.658. 522	100%	9.255.00 0	100%	4.513.0 00	0%	-	20%	1.418.00 0							20%	1.418.000
			3	0	1	0	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP tersusun	1 Doku men	2.123.9 28	1 Doku men	900.000	1 doku men	1.418.0 00	0 doku men	-	1 doku men	1.418.000						1 Doku men	1.418.000	
			3	0	1	0	0	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun	1 Doku men	1.844.7 66	1 Doku men	990.000	1 Doku men	1.043.0 00	0 Doku men	-	0 Doku men	-						0 Doku men	-	
			3	0	1	0	0	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tersusun	3 Doku men	15.689. 828	3 Doku men	7.365.000	3 Doku men	2.052.0 00	0 Doku men	-	0 Doku men	-						0 Doku men	-	
			3	0	1	3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1	551.925 .658	100%	334.800. 000	100%	269.99 5.000	90%	58.690.0 00	100%	73.995.0 00							132.685.00 0	

	3	05	19	39	003	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	1.Jumlah desa yang menyusun dokumen (RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa) 2. Jumlah desa yang melaksanakan pilkades 3.Jumlah desa terferivikasi ADD/DD	1. 6 Desa 2. 0 Desa 3. 6 Desa	213.333.502	1. 6 Desa 2. 4 Desa 3. 6 Desa	175.460.000	1. 6 Desa 2. 0 Desa 3. 6 Desa	151.200.000	1. 0 Desa 2. 0 Desa 3. 6 Desa	37.800.000	1. 6 Desa 2. 0 Desa 3. 6 Desa	37.800.000	1. 6 Desa 2. 0 Desa 3. 6 Desa	75.600.000								
	3	05	19	39	004	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Linmas terbina Trantib	328 orang	15.572.700	328 orang	9.000.000	328 orang	7.200.000	328 orang	1.200.000	0 orang	1.800.000	328 orang	3.000.000								
	3	05	19	39	005	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbina pemberdayaan	45 kelompok	283.782.510	45 kelompok	131.640.000	43 kelompok	41.620.000	43 kelompok	3.670.000	1 kelompok	17.350.000	43 kelompok	21.020.000								
	3	05	19	39	006	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1. Jumlah Lintas Sektor yang berpartisipasi dalam musrenbang 2. Jumlah desa kegiatan sosial yang terfasilitasi	1. 15 Unsur 2. 6 Desa	4.591.950	1. 15 Unsur 2. 6 Desa	2.300.000	1. 15 Unsur 2. 6 Desa	3.350.000	1. 15 Unsur 2. 6 Desa	3.350.000	1. 0 Unsur 2. 6 Desa	-	1. 15 Unsur 2. 6 Desa	3.350.000								
	3	05	19	39	007	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	100%	34.644.996	92%	16.400.000	90%	66.625.000	25%	12.670.000	25%	17.045.000	50%	29.715.000								

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pronojiwo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Pronojiwo berdasarkan NSPK dan SPM maupun terhadap IKK dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.30, sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pronojiwo

Kabupaten Lumajang

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai IKM Kecamatan		80	84	84	84,5	85	84	84	84,5	85	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019- 2021 memakai angka target
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti		100	100	67%	67%	83%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019- 2021 memakai angka target
	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu		67%	100%	67%	67%	83%	67%	67%	83,3%	83,3%	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019- 2021 memakai angka target

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Menentukan batasan sasaran Kinerja yang akan diukur:
2. Menentukan kapan pelaksanaan Kinerja
3. Menentukan anggaran yang tepat agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan dengan optimal.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Terdapat dua isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur yang dibahas dalam bagian ini, yaitu: (a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah, dan (b) Sinergitas Kebijakan antar wilayah.

a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat dan relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selainnya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Kualitas pertumbuhan yang memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif. Fakta tersebut dapat dilihat dengan adanya kesenjangan wilayah yang diindikasikan pada perbedaan PDRB Perkapita kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Timur. Dimana, daerah yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo). Sedangkan daerah dengan nilai PDRBperkapita kecil berada pada Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)

b) Sinergitas Kebijakan Antar Wilayah

Perbedaan karakteristik dan potensi wilayah diantara dua wilayah yang saling berbatasan, hingga saat ini masih berpotensi memicu gejolak antar masyarakat. Di sisi lain perbedaan dalam aturan dan penerapannya juga memungkinkan munculnya permasalahan yang memungkinkan terjadinya gejolak antar wilayah. Isu strategis dari permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar Provinsi (Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, maupun Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali) maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara lain:

1) Disharmoni aturan, kebijakan serta penerapannya;

Fenomena ini muncul seperti adanya perbedaan penerapan aturan pada sektor Pendidikan (misalnya perbedaan aturan Sekolah di dua wilayah perbatasan), kesehatan (misalnya dalam kebersamaan Pemberantasan Wabah Penyakit), Sosial (misalnya dalam kebersamaan penanganan PMKS), Perikanan & Kelautan (misalnya kesamaan dalam penerapan aturan pemakaian Jaring di Laut)

2) Kesenjangan Sosial/ekonomi;

Kesenjangan karakteristik Sosial Ekonomi kemasyarakatan seperti pada dua wilayah yang berbeda akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah.

3) Disorientasi Prioritas Pembangunan;

Perbedaan orirntasi pembangunan yang akan diprioritaskan berpotensi memunculkan masalah di wilayah perbatasan seperti perbedaaan waktu penanganan Infrastruktur jalan yang saling berhubungan pada dua wilayah yang saling berbatasan.

4) Eksploitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain di luar wilayah administrasinya sendiri. Fenomena pemakaian Air Bersih dari Provinsi lain dengan perlunya juga mempertimbangkan konservasi hutan serta daya dukung lingkungan.

5) Penetapan Batas Wilayah

b. Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah yang terjabarkan dalam table berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Rendahnya prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan
Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana		
Belum meratanya akses kebutuhan akses dasar masyarakat dan rendahnya kualitas SDM	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan
Masih tingginya angka kemiskinan		
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)

c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Pronojiwo

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Pronojiwo berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Pronojiwo dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Pronojiwo didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	Kurangnya sarana dan material administrasi Kependudukan	Kecamatan tidak bisa melakukan pengadaan belangko Kependudukan
	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur/alur pelayanan di Kecamatan	Kurangnya pemberian informasi tentang layanan kependudukan
		Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang layanan kependudukan di Kecamatan
	Rendahnya jumlah desa yang menyusun Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Ketentuan	Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tupoksi
		Kurang pemahaman apatur desa terhadap Peraturan perundang-undangan
		kurangnya kemampuan Sumberdaya Manusia
		Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa Administrasi Desa

d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun

untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang,

Tabel T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kehtuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Pronojiwo	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100	560.877.176	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Pronojiwo	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100	500.000.000	ada perubahan
	Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	26 Jenis	560.877.176	Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	26 Jenis	500.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pronojiwo	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	987.055.500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pronojiwo	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	620.000.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	15 Jenis	900.000.000	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	15 Jenis	500.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	15 Jenis	87.055.500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	15 Jenis	120.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Pronojiwo	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	14.814.200	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Pronojiwo	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	14.814.200	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kehtuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	1 dok	1.640.200	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	1 dok	1.640.200	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Dok	1.386.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Dok	1.386.000	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	3 dok	11.788.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	3 dok	11.788.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan Pronojiwo	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	439.645.500	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan Pronojiwo	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	498.195.500	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah desa yang menyusun dokumen (RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa)	6 Desa	184.285.500	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah desa yang menyusun dokumen (RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa)	6 Desa	184.285.500	
		Kecamatan Pronojiwo	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	4 Desa	-		Kecamatan Pronojiwo	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	4 Desa	-	
		Kecamatan Pronojiwo	Jumlah desa terferivikasi ADD/DD	6 Desa	-			Jumlah desa terferivikasi ADD/DD	6 Desa		
	Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah Linmas terbina Trantib	328 orang	11.700.000	Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah Linmas terbina Trantib	328 orang	11.700.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbina pemberdayaan	45 Kelompok	213.210.000	Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbina pemberdayaan	45 Kelompok	213.210.000	
	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah Lintas Sektor yang berpartisipasi dalam musrenbang	15 Unsur	3.450.000	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Kecamatan Pronojiwo	Jumlah lintas sektor yang berpartisipasi pada musrenbang	15 Unsur	9.000.000	
		Kecamatan Pronojiwo	Jumlah desa kegiatan sosial yang terfasilitasi	6 Desa	-		Kecamatan Pronojiwo	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan sosial	6 Desa	-	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Kecamatan Pronojiwo	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	100%	27.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Kecamatan Pronojiwo	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	100%	80.000.000	

a. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isuisu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan pembangunan fisik sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Pronojiwo. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C32

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2020

Kecamatan Pronojiwo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				
1	Rehabilitas Jalan	Desa Sumberurip	Perkerasan Jalan dan pembangunan TPT	1500m x 3,50m	
2	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Desa Pronojiwo RT 14 RW 06	TPT 90M x 2 M	90 m x 2 m	

3	Pengembangan Restocking Perairan Umum	Dusun Ranu RT 31 RW 11 dan Mulyoarjo RT 19 RW 07	40.000 ekor	Pengembangan Budidaya Ikan	
---	---------------------------------------	--	-------------	----------------------------	--

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Pronojiwo merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pronojiwo. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh Kecamatan Pronojiwo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Pronojiwo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pronojiwo

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidakhanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang, berikut penjabaran rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pronojiwo.

Tabel 4.1
PerubahanRencan Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pronojiwo
Tahun 2020

NO.	KODE REK.	URAIAN	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	3.05.3.05.19	PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN	445.851.700	380.151.700	65.700.000
1	01.021	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	445.851.700	380.151.700	65.700.000
2	3.05.3.0519	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	199.725.800	126.215.000	50.970.000
1	02.045	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	88.350.000	44.200.000	44.150.000
2	02.046	Pemeliharaanrutin / berkalaSaranadanPrasaranaAparatur	111.375.800	53.225.000	58.150.800
3	3.05.3.05.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAP. KINERJA DAN KEUANGAN	4.513.000	4.513.000	0
1	06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	1.418.000	1.418.000	0
2	06.003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.043.000	1.043.000	0
3	17.001	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	2.052.000	2.052.000	0
4	3.05.3.05.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	458.370.000	269.995.000	188.375.000
1	39.003	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	157.400.000	151.200.000	6.200.000
2	39.004	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	10.900.000	7.200.000	3.700.000
3	39.005	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	201.070.000	41.620.000	159.450.000
4	39.006	Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	8.300.000	3.350.000	4.950.000
5	39.007	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	80.700.000	66.625.000	14.075.000
Total			1.108.460.500	752.084.700	356.375.800

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renja didasarkan pada Perubahan Anggaran sesuai dengan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II lingkungan Kecamatan Pronojiwo.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Kecamatan Pronojiwo:

1. Realisasi Anggaran Program dari 4 Program yang belum ada yang mencapai 100%, yang selanjutnya akan direalisasikan pada Triwulan III dan Triwulan IV;
2. Realisasi kegiatan dari 11 kegiatan ada sebagian yang sudah mencapai 100%, sedangkan yang belum mencapai 100% perlu direalisasikan pada triwulan berikutnya;
3. Tingkat penyerapannya anggaran dari 4 Program triwulan II mencapai 47,09% dari total anggaran Rp. 2.144.080.030,00.

Pronojiwo, Juni 2020
Camat Pronojiwo



Drs. ABDULLAH
NIP. 19650814 198803 1 011